

ng_Bidang_Sosial,_Ekonomi,_H umaniora_dan_pendidikan_MITIGASI.pdf

by

Submission date: 30-Jan-2021 07:26AM (UTC+0800)

Submission ID: 1497387011

File name: ng_Bidang_Sosial,_Ekonomi,_Humaniora_dan_pendidikan_MITIGASI.pdf (325.85K)

Word count: 5115

Character count: 35362

Sosial, Humaniora
Ekonomi & Pendidikan

ISBN: 978-979-3793-71-9



PROSIDING

SEMINAR NASIONAL UIR 2017



**MITIGASI & STRATEGI ADAPTASI
DAMPAK PERUBAHAN IKLIM
DI INDONESIA**

Pekanbaru, 24-25 Februari 2017

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
2017

7
PROSIDING SEMINAR NASIONAL
LEMBAGA PENELITIAN UNIVERSITAS ISLAM RIAU

MITIGASI DAN STRATEGI ADAPTASI
DAMPAK PERUBAHAN IKLIM DI INDONESIA

PEKANBARU, 24-25 FEBRUARI 2017

Bidang Sosial, Ekonomi, Humaniora dan Pendidikan

ISSN 978-979-3793-71-9

EDITOR:

Dr. Evizal Abdul Kadir, ST., M.Eng

Hajry Arief Wahyudy, SP., MMA

Andri Kurniawan, B.PM., M.Si

Online pada:

<http://seminar.uir.ac.id>

DAMPAK PERUBAHAN KEBIJAKAN EKONOMI TERHADAP PENGURANGAN KEMISKINAN DI PROVINSI RIAU

Heriyanto

Program Studi Agribisnis
Fakultas Pertanian, Universitas Islam Riau
Jl. Kaharuddin Nasution 113 Perhentian Marpoyan Pekanbaru-Riau
email : heriyanto@agr.uir.ac.id

Abstrak

Keberhasilan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah daerah dapat dilihat dari tingkat kemiskinannya. Tingginya tingkat kemiskinan menunjukkan bahwa program pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah selama ini, belum memberikan hasil yang maksimal terutama program penganggulangan kemiskinan. Sementara itu, terdapat banyak faktor yang mempengaruhi kemiskinan, namun untuk merumuskan kebijakan pengentasan kemiskinan yang tepat perlu diidentifikasi faktor-faktor yang paling dominan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak perubahan kebijakan ekonomi terhadap pengurangan kemiskinan di Provinsi Riau. Penelitian ini menggunakan data time series yang terkait dengan kemiskinan tahun 1993-2014. Metode persamaan regresi berganda dengan metode analisis *ordinary least square (OLS)* digunakan untuk menjawab tujuan penelitian. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor dominan yang mempengaruhi kemiskinan adalah rata-rata lama sekolah, usia harapan hidup dan pengangguran. Selanjutnya dampak kebijakan peningkatan pertumbuhan ekonomi, investasi, pengeluaran pembangunan dan penurunan jumlah penduduk berdampak positif terhadap penurunan jumlah penduduk miskin di Provinsi Riau. Dari temuan tersebut dapat dinyatakan bahwa pengentasan kemiskinan dapat dilakukan melalui peningkatan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan merata disetiap golongan masyarakat, peningkatan IPM melalui rata-rata lama sekolah dan angka harapan hidup, penciptaan lapangan kerja melalui investasi, dan belanja APBD yang terkait belanja langsung pemerintah, peningkatan alokasi pengeluaran pembangunan serta meningkatkan program keluarga berencana dan memberikan pelayanan kesehatan gratis. Selanjutnya pengurangan pengangguran dengan melaksanakan program-program pembangunan padat karya yang melibatkan rumahtangga miskin.

Kata kunci: Kemiskinan, dampak factor pertanian

PENDAHULUAN

Tujuan utama pembangunan ekonomi tidak hanya pertumbuhan ekonomi semata, tetapi juga pengentasan kemiskinan, penanggulangan ketimpangan pendapatan dan penyediaan lapangan kerja dalam konteks perekonomian yang terus berkembang. Keberhasilan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah daerah tidak hanya diukur melalui Produk Domestik Regional Bruto tetapi juga dilihat dari tingkat kemiskinannya (Todaro, 2000).

Pertumbuhan ekonomi merupakan indikator keberhasilan dan syarat keharusan bagi penurunan tingkat kemiskinan. Syarat tersebut ialah pertumbuhan ekonomi yang efektif. Artinya, pemerataan pertumbuhan tersebut hendaknya menyebar di setiap golongan pendapatan, termasuk di golongan penduduk miskin. Secara langsung, hal ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi harus terjadi di sektor-sektor tempat penduduk miskin bekerja, yaitu sektor pertanian atau sektor padat karya. Secara tidak langsung, diperlukan peran pemerintah yang efektif guna mendistribusikan manfaat pertumbuhan yang mungkin hanya terjadi di sektor modern saja seperti jasa yang padat modal (Siregar dan Wahyuniarti, 2008).

Definisi kemiskinan sangatlah beragam, keberagaman dalam definisi kemiskinan dikarenakan masalah tersebut merupakan masalah yang kompleks dan bersifat multidimensional. Kemiskinan tidak hanya berkaitan dengan dimensi ekonomi, melainkan telah meluas ke dimensi sosial, kesehatan, pendidikan dan politik. Todaro (2006) menjelaskan bahwa kemiskinan adalah ketidakmampuan untuk memenuhi standar hidup minimum yang sesuai dengan tingkat kelayakan

Seminar Nasional "Mitigasi Dan Strategi Adaptasi Dampak Perubahan Iklim Di Indonesia"

hidup. Sedangkan menurut Badan Pusat Statistik Indonesia (2007), kemiskinan adalah ketidakmampuan individu atau rumahtangga memenuhi standar minimum kebutuhan dasar yang meliputi kebutuhan makan maupun non makan yang diukur dengan menggunakan garis kemiskinan.

Bappenas (2010) mendefinisikan kemiskinan sebagai suatu kondisi di mana seseorang atau sekelompok orang yang tidak mampu menyelenggarakan hidupnya sampai taraf tertentu yang dianggap manusiawi. Definisi ini beranjak dari pendekatan berbasis hak yang mengu akui bahwa masyarakat miskin mempunyai hak-hak dasar yang sama dengan anggota masyarakat lainnya. Todaro dan Smith (2006) berpendapat bahwa tinggi rendahnya tingkat kemiskinan di suatu negara tergantung pada dua faktor utama, yaitu: tingkat pendapatan nasional rata-rata dan lebar dan sempitnya kesenjangan dalam distribusi pendapatan.

Menurut Badan Pusat Statistik Indonesia tahun 2015 jumlah penduduk miskin Indonesia sebesar 28513,57 ribu jiwa (11,16%) masih lebih tinggi apabila dibandingkan dengan jumlah penduduk miskin Riau mencapai 562,92 ribu jiwa (8,87%) dari jumlah penduduk Riau. Oleh karena itu, upaya pengentasan kemiskinan harus dilakukan secara komprehensif, mencakup aspek-aspek kehidupan masyarakat dan dilaksanakan secara terpadu. Usaha pemerintah dalam menanggulangi kemiskinan di provinsi Riau memperlihatkan pengaruh yang positif. Hal tersebut dapat dilihat dari tingkat kemiskinan Provinsi Riau yang mengalami penurunan. Namun demikian, apabila dilihat berdasarkan indeks kedalaman keparahan kemiskinan, kemiskinan di Provinsi Riau masih tergolong tinggi.



Sumber: Badan Pusat Statistik (Riau dalam Angka 2008-2015)

Gambar 1. Tingkat Kemiskinan Provinsi Riau dan Nasional Tahun 2007-2014

Kemiskinan merupakan masalah yang kompleks dan bersifat multidimensional. ¹⁵ Persoalan kemiskinan bukan hanya sekedar berapa jumlah dan persentase penduduk miskin. Dimensi lain yang perlu diperhatikan adalah tingkat kedalaman dan keparahan dari kemiskinan. Selain harus mampu memperkecil jumlah penduduk miskin, kebijakan kemiskinan juga harus bisa sekaligus mengurangi tingkat kedalaman dan keparahan dari kemiskinan (BPS Indonesia, 2013).

Terdapat banyak faktor yang mempengaruhi kemiskinan suatu daerah. Wongdesmiati (2009) mengemukakan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi kemiskinan, yaitu jumlah penduduk, produk domestik bruto dan usia harapan hidup. Selain ketiga faktor diatas, Prastyo (2010), Saputra (2011) dan Permana (2012) menjelaskan bahwa kemiskinan dipengaruhi oleh tingkat pendidikan, kesehatan dan jumlah pengangguran. Sedangkan menurut Brata (2005) kemiskinan juga dipengaruhi oleh investasi dan pengeluaran pemerintah daerah.

Berdasarkan uraian diatas penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak perubahan kebijakan ekonomi terhadap pengurangan kemiskinan di Provinsi Riau dari hasil analisis tersebut dapat dirumuskan rekomendasi pengentasan kemiskinan di Provinsi Riau.

KAJIAN PUSTAKA

Konsep kemiskinan

Kemiskinan merupakan masalah yang kompleks dan bersifat multidimensional, karena tidak hanya berkaitan dengan dimensi ekonomi saja, melainkan telah meluas ke dimensi-dimensi sosial, kesehatan, pendidikan dan politik. Kemiskinan itu sendiri sering didefinisikan sebagai suatu kondisi dimana seseorang tidak mampu atau tidak memiliki kecukupan pendapatan dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar hidupnya seperti pangan, sandang, papan, pendidikan dan kesehatan.

Penduduk yang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar minimum menurut Badan Pusat Statistik Provinsi Riau dapat dikategorikan sebagai penduduk miskin. Nilai garis kemiskinan digunakan mengacu pada kebutuhan minimum 2.100 kkal per kapita per hari ditambah dengan kebutuhan minimum non makanan yang merupakan kebutuhan dasar seseorang yang meliputi kebutuhan dasar untuk papan, sandang, sekolah, transportasi serta kebutuhan rumah tangga dan individu yang mendasar lainnya. Besarnya nilai pengeluaran (dalam rupiah) untuk memenuhi kebutuhan dasar minimum makanan dan non makanan tersebut disebut garis kemiskinan (BPS Provinsi Riau, 2014).

Bappenas (2010) mendefinisikan kemiskinan sebagai suatu kondisi seseorang atau sekelompok orang baik laki-laki maupun perempuan yang tidak mampu memenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat. Menurut BPS Provinsi Riau (2009), secara konseptual definisi kemiskinan dapat dilihat dari dua sisi, yaitu: (1) Kemiskinan Absolut dan (2) Kemiskinan Relatif.

Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kemiskinan

Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi digunakan sebagai salah satu indikator dalam mengukur tingkat pembangunan ekonomi (prestasi ekonomi) suatu negara. Menurut Budiono (1999), pertumbuhan ekonomi adalah suatu proses kenaikan output nasional per kapita dalam jangka panjang. Kata proses dari kalimat diatas mengandung unsur perubahan dan indikator pertumbuhan ekonomi yang dilihat dalam kurun waktu cukup yang panjang. Menurut Todaro dan Smith (2006), terdapat tiga faktor utama dalam pertumbuhan ekonomi, yaitu: (1) Akumulasi Modal, (2) Pertumbuhan penduduk dan angkatan kerja dan (3) Kemajuan Teknologi.

Masalah kemiskinan tidak dapat dipecahkan begitu saja hanya dengan mengharapkan efek menetes kebawah dari pertumbuhan ekonomi. Siregar dan Wahyuniarti (2008) berpendapat bahwa pertumbuhan ekonomi memang menjadi syarat untuk mengurangi tingkat kemiskinan. Selain itu, pertumbuhan ekonomi juga digunakan sebagai indikator keberhasilan pembangunan suatu wilayah. Adapun syarat untuk mengurangi kemiskinan adalah hasil dari pertumbuhan ekonomi tersebut menyebar di setiap golongan masyarakat, termasuk golongan penduduk miskin. Dalam penelitiannya Wongdesmiwati (2009), ia menemukan bahwa antara pertumbuhan ekonomi dan tingkat kemiskinan memiliki hubungan yang negatif. Artinya, kenaikan pertumbuhan ekonomi akan menurunkan tingkat kemiskinan. Hubungan tersebut menunjukkan bahwa mempercepat pertumbuhan ekonomi penting untuk menurunkan tingkat kemiskinan.

Jumlah Penduduk

Menurut Sukirno (2006), jumlah penduduk merupakan masalah mendasar dalam pembangunan ekonomi suatu daerah. Pertumbuhan penduduk yang tidak terkendali akan mengakibatkan tidak tercapainya tujuan pembangunan ekonomi, yaitu kesejahteraan rakyat dan menekan angka kemiskinan. Perkembangan jumlah penduduk dapat menjadi faktor penghambat dan pendorong dalam pembangunan. Dikatakan sebagai faktor penghambat pembangunan karena perkembangan jumlah penduduk yang besar dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi akan menurunkan produktivitas dan akan terjadi peningkatan pengangguran, sehingga menambah beban pembangunan. Sedangkan dikatakan sebagai faktor pendorong karena: (a) meningkatkan jumlah

Seminar Nasional "Mitigasi Dan Strategi Adaptasi Dampak Perubahan Iklim Di Indonesia"

tenaga kerja; (b) terjadi perluasan pasar, hal ini dikarenakan luas pasar barang dan jasa ditentukan oleh pendapatan masyarakat dan jumlah penduduk. Laju pertumbuhan penduduk yang tinggi merupakan masalah yang banyak dialami oleh negara sedang berkembang. Masalah kependudukan yang dihadapi, yaitu tingginya tingkat fertilitas dan tingkat mortalitas, namun angka fertilitasnya masih lebih tinggi. Angka fertilitas yang tinggi tersebut dapat disebabkan oleh pernikahan di usia dini dan kurangnya pengetahuan mengenai keluarga berencana. Sedangkan angka mortalitas yang tinggi disebabkan oleh kualitas kesehatan masyarakat yang masih rendah.

Menurut Todaro dan Smith (2006), modal pembangunan dikatakan handal apabila jumlah penduduk yang besar diikuti dengan kualitas sumberdaya manusia yang memadai, akan tetapi apabila kualitas sumberdaya manusianya rendah justru akan menjadi beban bagi pembangunan suatu negara. Banyak penelitian yang telah membuktikan adanya keterkaitan yang positif antara jumlah penduduk dan jumlah penduduk miskin, antara lain penelitian yang dilakukan oleh Siregar dan Wahyuniarti (2008), Wongdesmiati (2009), yang mengemukakan bahwa terdapat hubungan yang positif antara jumlah penduduk yang besar dan peningkatan jumlah penduduk miskin.

Pendidikan

Pendidikan memainkan peran utama dalam membentuk kemampuan sebuah negara berkembang untuk menyerap teknologi modern dan untuk mengembangkan kapasitas agar tercipta pertumbuhan serta pembangunan yang berkelanjutan (Todaro dan Smith, 2006). Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang pendidikan, menjelaskan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara.

Todaro (2000) mengemukakan bahwa pendidikan memiliki pengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Hal ini disebabkan tersedianya tenaga kerja yang terampil dan terdidik menjadi syarat penting dalam proses berlangsungnya pembangunan ekonomi secara berkesinambungan. Selain itu, dalam upaya mencapai pembangunan yang berkelanjutan sektor pendidikan yang sangat strategis terutama dalam mendorong akumulasi modal yang dapat mendukung produksi dan aktivitas ekonomi lainnya.

Pendidikan dan kemiskinan memiliki keterkaitan yang sangat besar karena pendidikan dapat meningkatkan kemampuan individu untuk berkembang lewat penguasaan ilmu pengetahuan dan keterampilan. Dalam penelitiannya Siregar dan Wahyuniarti (2008) menemukan bahwa pendidikan yang diukur dengan melihat jumlah penduduk yang lulus SMP, SMA, dan Diploma memiliki pengaruh besar dan sangat signifikan dalam pengurangan jumlah penduduk. Hal tersebut mencerminkan bahwa pembangunan modal manusia melalui peningkatan pendidikan merupakan determinan penting dalam proses penurunan jumlah penduduk miskin.

Kesehatan

Menurut Todaro dan Smith (2006), salah satu inti dari kesejahteraan adalah kesehatan. Kesehatan merupakan aspek yang penting dalam pembangunan berkelanjutan dan menjadi syarat bagi peningkatan produktivitas. Sumberdaya manusia (SDM) yang sehat dan kuat merupakan modal dasar penting dalam pembangunan ketersediaan air bersih, akses terhadap layanan kesehatan, gizi yang baik, ketersediaan pangan yang cukup, dan tempat tinggal yang bebas polusi semuanya menyebabkan terjaminnya kesehatan penduduk. Jika sejumlah faktor tersebut diabaikan, maka akan mempengaruhi resiko kesehatan penduduk yang pada akhirnya akan menghambat terwujudnya pembangunan berkelanjutan.

Kesehatan merupakan tolok ukur utama dari pembangunan dan kesejahteraan nasional suatu bangsa. Dengan demikian kesehatan harus menjadi arus utama pembangunan berkelanjutan. Bukan hanya sebagai tolak ukur keberhasilan dari pembangunan suatu bangsa dan negara, namun hidup yang sehat adalah hak asasi manusia. Usia harapan hidup merupakan salah satu alat untuk

mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk pada umumnya, dan meningkatkan derajat kesehatan pada khususnya. Usia harapan hidup menggambarkan umur rata-rata yang dapat dicapai seseorang dalam situasi mortalitas yang berlaku di lingkungan masyarakatnya. Apabila usia harapan hidup suatu daerah rendah hal tersebut menunjukkan bahwa pembangunan kesehatan belum berhasil, dan sebaliknya semakin tinggi usia harapan hidup menunjukkan bahwa pembangunan kesehatan di daerah tersebut berhasil (BPS Provinsi Riau, 2011).

Pengangguran

Pengangguran merupakan masalah ketenagakerjaan yang banyak dialami oleh negara-negara di dunia. Seseorang dapat dikatakan sebagai pengangguran apabila ia yang telah tergolong sebagai angkatan kerja, secara aktif sedang mencari pekerjaan pada tingkat upah tertentu, akan tetapi tidak memperoleh pekerjaan yang diinginkannya. Pengangguran dapat mengakibatkan penurunan pendapatan masyarakat, yang berdampak pada penurunan tingkat kemakmuran yang dicapai oleh masyarakat (Sumarsono, 2003).

Menurut Sukirno (2005), Pengangguran dapat mengurangi pendapatan masyarakat, yang akan berakibat pada penurunan tingkat kemakmuran yang ingin dicapai. Pengangguran dapat menimbulkan masalah ekonomi dan sosial bagi kehidupan seorang pengangguran. Kesejahteraan masyarakat yang semakin menurun akibat menganggur maka akan berakibat pada peningkatan peluang mereka terjerat dalam lingkaran kemiskinan dikarenakan mereka tidak memiliki pendapatan. Apabila tingkat pengangguran suatu negara tinggi, terjadi kekacauan politik dan sosial maka akan mengakibatkan efek buruk terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat dan prospek pembangunan ekonomi dalam jangka panjang.

Investasi

Teori pertumbuhan Harrod-Domar menyatakan adanya hubungan yang positif antara tingkat investasi dan laju pertumbuhan ekonomi. Teori ini pada hakekatnya menekankan perlunya penanaman modal untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi. Menurut Nurkse lingkaran kemiskinan di negara berkembang dapat dipotong dengan pembentukan modal. Sehingga pembentukan modal dipandang sebagai salah satu faktor dan sekaligus sebagai faktor utama di dalam pembangunan ekonomi (Jhingan, 2008).

Selanjutnya Jhingan (2008), pembangunan ekonomi merupakan proses pembentukan modal *overhead* sosial dan ekonomi. Pembentukan modal dapat dilakukan apabila laju pembentukan modal di dalam negeri cukup cepat, yaitu pada saat pendapatan masyarakat lebih besar yang diinvestasikan daripada digunakan untuk konsumsi. Pembentukan modal juga menciptakan perluasan pasar, membantu menyingkirkan ketidakefisienan pasar dengan menciptakan modal *overhead* sosial dan ekonomi. Jadi investasi dapat memotong rantai kemiskinan baik dari sisi penawaran maupun permintaan.

Sukirno (2006) menjelaskan bahwa investasi digolongkan kepada komponen perbelanjaan agregat yang bersifat otonomi, yaitu tingkat investasi yang berlaku tidak dipengaruhi oleh pendapatan nasional. Dalam analisis Keynes menunjukkan dua faktor penting yang menentukan investasi, yaitu suku bunga dan ekspektasi masa depan mengenai keadaan kegiatan ekonomi.

Pengeluaran Pemerintah

Menurut Sukirno (2006), pengeluaran pemerintah adalah keseluruhan pengeluaran yang digunakan untuk kepentingan masyarakat. Pengeluaran untuk menyediakan fasilitas pendidikan dan kesehatan, pengeluaran untuk menyediakan polisi dan tentara, pengeluaran gaji untuk pegawai pemerintah dan pengeluaran untuk pengembangan infrastruktur dibuat untuk kepentingan masyarakat. Pengeluaran pemerintah juga dipandang sebagai perbelanjaan otonomi karena pendapatan nasional bukanlah merupakan faktor penting yang akan mempengaruhi keputusan pemerintah untuk menentukan anggaran belanja.

Todaro (2006) mengemukakan bahwa pengeluaran pemerintah (*government expenditure*) dapat mempengaruhi aktivitas ekonomi. Selain itu, pengeluaran pemerintah dapat menciptakan

Seminar Nasional "Mitigasi Dan Strategi Adaptasi Dampak Perubahan Iklim Di Indonesia"

berbagai prasarana yang dibutuhkan dalam proses pembangunan, juga merupakan salah satu komponen dari permintaan agregat (*aggregate demand*) yang kenaikannya akan mendorong produksi atau PDB, sepanjang perekonomian belum mencapai tingkat kesempatan kerja penuh (*full employment*).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan data sekunder berupa data *time series* tahun 1993-2014. Data-data tersebut diperoleh dari Badan Pusat Statistik Provinsi Riau, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Riau dan data-data dari sumber lain yang berupa jurnal ilmiah dan buku teks. Secara rinci dapat dilihat di Tabel 1.

Tabel 1. Data dan Sumber Data Penelitian

No.	Data	Sumber Data
1	Jumlah Penduduk Miskin	DPS Provinsi Riau dan BAPPEDA Provinsi Riau
2	PDRB	BPS Provinsi Riau dan HAPPHIDA Provinsi
3	Jumlah Penduduk	BPS Provinsi Riau dan BAPPEDA Provinsi
4	Rata-rata Lama Sekolah	BPS Provinsi Riau dan BAPPEDA Provinsi Riau
5	Usia Harapan Hidup	BPS Provinsi Riau dan BAPPEDA Provinsi
6	Pengangguran	BPS Provinsi Riau, Disnakortransduk Provinsi Riau, Penelitian terdahulu
7	Investasi	BPS Provinsi Riau
8	Pengeluaran Pembangunan	BPS Provinsi Riau
9	U/M	BPS Provinsi Riau
10	IHK	BPS Provinsi Riau

Penelitian ini menggunakan model regresi berganda dengan metode analisis *ordinary least square* (OLS). Model persamaan regresinya diformulasikan sebagai berikut

$$JPM = b_0 + b_1PDRB + b_2JP + b_3RLS + b_4UHH + b_5PENG + b_6INV + b_7PP + U_t \quad (1)$$

Dimana:

- JPM = Jumlah Penduduk Miskin (jiwa),
- PDRB = PDRB harga konstan tahun 2000 tanpa migas (Juta Rp)
- JP = Jumlah Penduduk (jiwa)
- RLS = Rata-rata lama sekolah (tahun)
- UHH = Usia harapan hidup (tahun)
- JPT = Jumlah pengangguran terbuka (jiwa)
- INV = Investasi (Juta Rp)
- PP = Pengeluaran Pembangunan (Juta Rp)
- b_0 = *intercept*
- b_1, \dots, b_7 = Koefisien regresi
- u_t = Residual
- t = 1, 2, 3, 4, 5 (data time-series, tahun 1993-2014)

Untuk membuktikan hipotesis, dilakukan analisis pada tingkat kepercayaan 90%. Untuk mengetahui faktor apa yang mempengaruhi kemiskinan di Provinsi Riau dilakukan dengan uji t.

Apabila $|t| > Pr$, maka H_0 ditolak dan H_1 diterima sampai dengan toleransi Level of Significance (α) 10%. Hipotesis yang akan diuji meliputi:

1. Pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif terhadap jumlah penduduk miskin;
2. Jumlah penduduk berpengaruh positif terhadap jumlah penduduk miskin;
3. Rata-rata lama sekolah berpengaruh negatif terhadap jumlah penduduk miskin;
4. Usia harapan hidup berpengaruh negatif terhadap jumlah penduduk miskin;
5. Jumlah pengangguran berpengaruh positif terhadap jumlah penduduk miskin;

6. Investasi berpengaruh negatif terhadap jumlah penduduk miskin;
7. Pengeluaran pembangunan berpengaruh negatif terhadap jumlah penduduk miskin;

Model ekonometrika yang baik harus memenuhi uji asumsi klasik, yaitu dengan melakukan uji multikolinieritas, autokorelasi, heteroskedastisitas, dan normalitas. Menurut Widarjono (2009), uji multikolinieritas dilakukan untuk mengetahui apakah terdapat korelasi antar variabel independen dalam model regresi. Untuk mendeteksi multikolinieritas dalam suatu model dilakukan dengan melihat *Variance Inflation Factor*. Apabila nilai VIF lebih kecil dari 10 maka tidak terjadi multikolinieritas. Adapun persamaan *Variance Inflation Factor*, sebagai berikut:

$$\text{Variance Inflation Factor} = 1/\text{tolerance} \dots\dots\dots (2)$$

Uji autokorelasi digunakan untuk mengetahui apakah dalam suatu model regresi linier terdapat korelasi antara anggota observasi satu dengan observasi lain yang berlainan waktu. Untuk menguji autokorelasi dengan menggunakan *Durbin-Watson*, dengan formula sebagai berikut (Widarjono, 2009):

$$d = \frac{\sum_{t=2}^n (\hat{e}_t - \hat{e}_{t-1})^2}{\sum_{t=1}^n \hat{e}_t^2} \dots\dots\dots$$

(3)

dimana d = koefisien *Durbin-Watson*; t = t hitung; n = sampel; e = residual. Nilai d yang diperoleh dibandingkan dengan nilai d_U dan d_L . Apabila $0 < d < d_L$ atau $4 - d_L < d < 4$ berarti terdapat autokorelasi, bila nilai d terletak antara $d_L < d < d_U$ atau $4 - d_U < d < 4 - d_L$ berarti tidak dapat dipastikan adanya autokorelasi, bilamana $d_U < d < 4 - d_U$ berarti tidak ada autokorelasi positif/negatif.

Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui apakah suatu variabel berdistribusi normal atau tidak dengan menggunakan *Shapiro-Wilk* dengan formula sebagai berikut (Verbeek et al., 2000):

$$W = \frac{[\sum_{i=1}^h a_n (\hat{e}_{(v-1+1)} - \hat{e}_{(i)})]^2}{\sum_{i=1}^h (\hat{e}_i - \bar{e})^2} \dots\dots\dots$$

(4)

dimana v = T- kn; h = n/2 untuk bilangan genap atau (n-1)/2 untuk bilangan ganjil; v = derajat bebas; T = jumlah observasi; K = jumlah variabel; a_n = parameter penduga dari statistik *Shapiro-Wilk*. Apabila nilai W mendekati 1 dan signifikan maka model yang dibangun berdistribusi normal.

Uji heteroskedastisitas digunakan untuk apakah kondisi varian dari variabel pengganggu tidak konstan untuk semua observasi, yaitu dengan menggunakan *White test*. Secara manual, uji ini dilakukan dengan meregresi residual kuadrat (\hat{e}_i^2) dengan variabel bebas. Dapatkan nilai R^2 , untuk

menghitung χ^2 , dimana $\chi^2 = \text{Obs} \cdot R\text{-square}$. Kriteria yang digunakan adalah apabila χ^2_{df} tabel < nilai $\text{Obs} \cdot R\text{-squared}$, maka hipotesis nol yang menyatakan bahwa tidak ada heteroskedastisitas dalam model dapat ditolak (Widarjono, 2009).

Setelah diperoleh nilai koefisien regresi kemudian dihitung nilai elastisitas. Perhitungan nilai elastisitas digunakan untuk mengetahui seberapa besar derajat kepekaan variabel dependen terhadap perubahan yang terjadi pada variabel dependen dalam suatu persamaan, yakni elastisitas jangka pendek dan jangka panjang (Hessie, 2009). Adapun rumus yang digunakan sebagai berikut:

$$E_{SR} = \alpha_t \frac{\bar{X}_t}{\bar{Y}_t} \dots\dots\dots$$

(5)

$$E_{LR} = \frac{E_{SR}}{1 - \text{Koefisien Lag Peubah dependen}} \dots\dots\dots$$

(6)

Dimana E_{SR} = elastisitas jangka pendek (*short term*) variabel dependen, Y, terhadap variabel independen, X_t ; E_{LR} = elastisitas jangka pendek (*short term*) variabel dependen, Y, terhadap variabel independen X_t ; \bar{X}_t = nilai rata-rata variabel independen X ke-t; \bar{Y}_t = nilai rata-rata variabel dependen,

Y ke-t; α_i = parameter dugaan variabel independen ke-t. Jika nilai elastistas lebih besar dari satu berarti variabel dependen, Y, responsif terhadap variabel independen, Xt. Jika nilai elastistas lebih kecil dari satu berarti variabel dependen, Y, tidak responsif terhadap variabel independen, Xt. Untuk mengetahui apakah suatu model cukup baik dalam analisis simulasi kebijakan digunakan validasi model. Dalam penelitian ini validasi model menggunakan kriteria statistik, yaitu UM (Bias Propotion) dan U-Theil (Koutsoyiannis, A. 1977).

* U_M (Bias Propotion)

$$U_M = \frac{(P - A)^2}{\sum (P_i - A_i)^2 / n}$$

* U - Theil's (Theil's Inequality Coefficient)

$$U = \frac{\sqrt{1/n * \sum (P_i - A_i)^2}}{\sqrt{(1/n) * \sum (P_i)^2 + (1/n) * \sum (A_i)^2}}$$

- \bar{P} = Bias Proportion
- n = jumlah observasi/pemerhatian
- P_i = nilai pendugaan model (*predicted*)
- A_i = nilai pengamatan contoh (*actual*)

Statistik U_M (*Bias Propotion*) digunakan untuk mengukur tingkat penyimpangan nilai estimasi peubah endogen dari nilai aktual peubah endogen dalam ukuran relatif atau untuk mengukur kedekatan nilai dugaan tersebut dengan nilai aktualnya. Sedangkan untuk mengetahui kemampuan model dalam analisis simulasi peramalan digunakan statistik U. Nilai koefisien Theil (U) terletak antara 0 dan 1. Jika $U = 0$, dapat dikatakan pendugaan model sempurna, tetapi jika $U = 1$ maka pendugaan model naif. Untuk melihat keeratan arah (*slope*) antara aktual dengan hasil yang disimulasi dilihat dari nilai koefisien determinasi (R^2). Pada dasarnya makin kecil nilai U_M dan U -Theil's dan makin besar nilai R^2 , maka pendugaan model semakin baik.

Analisis simulasi kebijakan untuk melihat dampak kebijakan ekonomi terhadap kemiskinan di Provinsi Riau. Skenario simulasi tersebut adalah sebagai berikut:

1. Produk Domestik Regional Bruto naik 11%
Nilai 11% dilihat dari tren produk domestik regional bruto dari tahun 2005-2014 dengan rata-rata 11%,
2. Jumlah Penduduk naik 2%,
Nilai 3% dilihat dari tren jumlah penduduk dari tahun 2005-2014 dengan rata-rata 3%,
3. Investasi naik 7 %,
Nilai 7 % dilihat dari tren investasi dari tahun 2005-2014 dengan rata-rata 7%.,

Seminar Nasional "Mitigasi Dan Strategi Adaptasi Dampak Perubahan Iklim Di Indonesia"

4. Pengeluaran Pembangunan naik 18%
Nilai 18% dilihat dari tren pengeluaran pembangunan dari tahun 2005-2014 dengan rata-rata 18%.
5. Jumlah penduduk naik 3% dan investasi naik 7%,
6. Jumlah penduduk naik 3% dan pengeluaran pembangunan naik 18%,
7. Produk Domestik Regional Bruto naik 11%, investasi naik 7%, pengeluaran pembangunan naik 18% dan jumlah penduduk turun 3%.
- 8.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sebagaimana telah dijelaskan pada bagian metode penelitian untuk memperoleh hasil yang baik pada suatu model yang dianalisis dengan metode *ordinary least square*, perlu dilakukan uji asumsi klasik yaitu uji multikolinieritas, autokorelasi, heteroskedastisitas dan normalitas. Hasil uji multikolinieritas menunjukkan bahwa nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) semua variabel bebas berada dibawah 10, dimana batas maksimum VIF sebesar 10. Berdasarkan nilai VIF semua variabel bebas, dapat disimpulkan bahwa dalam model yang dibangun tidak terjadi multikolinieritas.

Model yang dibangun juga tidak mengalami masalah autokorelasi. Hal ini dapat dilihat dari nilai *Durbin-Watson* (DW) pada model yang dibangun mendekati 2, yaitu sebesar 1,647. Selain itu, masalah heteroskedastisitas juga tidak terjadi dimana nilai *Probability Obs*R-squared* sebesar 48,04% > α , yaitu 10% sehingga H_0 diterima. Uji normalitas menggunakan uji statistik *Shapiro-Wilk* sebesar 0,92, berbeda nyata dengan 0,08 pada taraf nyata 10%. Hal ini mengindikasikan bahwa model yang dibangun berdistribusi normal.

Tabel 2 menunjukkan bahwa nilai koefisien determinasi (R^2) model penelitian yang diperoleh sebesar 0,6276. Hal ini menunjukkan bahwa 62,76% variabel kemiskinan dapat dijelaskan oleh variabel PDRB, jumlah penduduk, pendidikan, kesehatan, investasi dan pengeluaran pembangunan, sedangkan 37,34% sisanya dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan kedalam persamaan.

Tabel 2. Hasil Estimasi Model Faktor Dominan Mempengaruhi Kemiskinan di Provinsi Riau

Varabel	Parameter Estimasi	Standard Error	t Value	Pr > t	Variance Inflation	Esr
Intercept	788187	196511	4.01	0.0015	0	
Produk Domestik Regional Bruto	-0.00057	0.000408	-1.39	0.1874	2.00155	-
Jumlah penduduk	0.05211	0.05915	0.55	0.589	9.24139	-
Rata-rata lama sekolah	-87885	33070	-2.66	0.0197	6.47035	-1.28
usia harapan hidup	66121	25811	2.79	0.0152	1.24817	8.71
Pengangguran	1.3637	0.30363	4.49	0.0006	2.37756	0.44
investasi	0.00814	0.00772	1.05	0.3109	7.58151	-
pengeluaran pembangunan	0.00567	0.04306	0.13	0.8972	1.22955	-
	$R^2 = 65.79\%$		$Pr > F = 0.0228$		$DW = 1.647$	

Berdasarkan hasil estimasi model pada Tabel 1 diketahui bahwa terdapat 3 variabel yang berpengaruh nyata terhadap kemiskinan, yaitu rata-rata lama sekolah, usia harapan hidup dan jumlah pengangguran. Hasil estimasi yang diperoleh menunjukkan bahwa rata-rata lama sekolah berpengaruh negatif dan signifikan pada $\alpha = 10\%$. Koefisien regresi rata-rata lama sekolah sebesar -87.885, artinya apabila rata-rata lama sekolah meningkat 1 tahun akan menurunkan jumlah penduduk miskin sebesar 87.885 jiwa. Rata-rata lama sekolah memiliki nilai elastisitas yang negatif sebesar 1,28 yang berarti setiap peningkatan 1% rata-rata lama sekolah akan menurunkan jumlah penduduk miskin sebesar 1,287%. Hal ini menunjukkan bahwa kemiskinan responsif secara negatif terhadap rata-rata lama sekolah. Menurut Arsyad (2010), yang menjelaskan bahwa pendidikan memiliki peran penting dalam mengurangi kemiskinan dalam jangka panjang, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui pelatihan untuk golongan miskin, sehingga pengetahuan dan keahlian akan meningkatkan produktivitas dan efektivitas penduduk miskin. Oleh karena itu, dalam rangka menurunkan jumlah penduduk miskin dapat dilakukan dengan

Seminar Nasional "Mitigasi Dan Strategi Adaptasi Dampak Perubahan Iklim Di Indonesia"

meningkatkan rata-rata lama sekolah melalui pelaksanaan program wajib belajar 12 tahun dengan memberikan beasiswa kepada anak-anak miskin. Dengan adanya investasi pendidikan, diharapkan mampu memutus rantai kemiskinan di Provinsi Riau.

Usia harapan hidup berpengaruh negatif terhadap jumlah penduduk miskin dengan $\alpha = 10\%$. Koefisien regresi usia harapan hidup sebesar -66.727 , artinya apabila usia harapan hidup meningkat 1 tahun maka akan menurunkan jumlah penduduk miskin sebanyak 66.727 jiwa. Usia harapan hidup memiliki nilai elastisitas yang negatif sebesar 8,74, artinya setiap peningkatan usia harapan hidup 1% akan menurunkan jumlah penduduk miskin sebesar 8,74%. Hal ini menunjukkan bahwa kemiskinan responsif terhadap usia harapan hidup, sehingga dapat memberikan gambaran bahwa usia harapan hidup merupakan faktor yang paling besar pengaruhnya dalam mengurangi jumlah penduduk miskin. Hasil ini senada dengan teori dimana negara-negara dengan tingkat kesehatan yang lebih baik, maka usia harapan hidup penduduknya lebih lama, sehingga secara ekonomis memiliki peluang untuk memperoleh pendapatan yang lebih tinggi. Arsyad (2010), menjelaskan bahwa intervensi untuk memperbaiki kesehatan merupakan suatu alat kebijakan penting untuk mengurangi kemiskinan. Dengan demikian, untuk meningkatkan usia harapan hidup dapat dilakukan dengan memberikan pelayanan kesehatan gratis kepada rumah tangga miskin, peningkatan kualitas gizi balita dan ibu.

Jumlah pengangguran berpengaruh negatif terhadap jumlah penduduk miskin dengan $\alpha = 10\%$. Nilai koefisien regresi jumlah pengangguran sebesar 1,3637 artinya apabila jumlah pengangguran meningkat 1 jiwa akan menyebabkan peningkatan jumlah penduduk miskin sebesar 1,3637 jiwa. Jumlah pengangguran memiliki elastisitas sebesar 0,37, artinya peningkatan jumlah pengangguran sebesar 1% akan meningkatkan jumlah penduduk miskin sebesar 0,37%. Hal ini mengindikasikan bahwa pengangguran tidak responsif terhadap jumlah penduduk miskin, karena nilai elastisitas pengangguran lebih kecil dari 1. Hasil tersebut sesuai dengan pendapat Sukirno (2004) dan Sit Agus Prastyo (2010), peningkatan jumlah pengangguran berdampak pada pengurangan pendapatan masyarakat dan akan mengurangi tingkat kemakmuran yang mereka capai. Secara individu pengangguran menimbulkan berbagai masalah ekonomi dan sosial bagi mereka yang mengalaminya. Keadaan tersebut memaksa para pengangguran untuk mengurangi pengeluaran konsumsinya. Dengan demikian, untuk mengurangi jumlah pengangguran dapat dilakukan melalui kebijakan perluasan kesempatan kerja, peningkatan kualitas serta produktivitas tenaga kerja melalui program-program pembangunan dan menciptakan iklim investasi yang bersifat padat karya yang mampu menyerap tenaga kerja yang berasal dari rumah tangga miskin.

Hasil simulasi dampak kebijakan ekonomi terhadap kemiskinan di Provinsi Riau. Dampak perubahan kebijakan terhadap variabel dependen dalam simulasi kebijakan dapat berpengaruh secara positif maupun negatif terhadap variabel dependennya.

Skenario simulasi ini menggunakan empat variabel, yaitu variabel Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), jumlah penduduk, investasi, dan pengeluaran pemerintah. Simulasi dapat dilakukan karena keempat variabel independen tersebut berpengaruh terhadap variabel dependen, yaitu jumlah penduduk miskin. Hasil simulasi keempat variabel dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 3. Hasil Simulasi Historis Perubahan Kebijakan Ekonomi Terhadap Kemiskinan

Skenario	Nilai (Jiwa)	Perubahan (%)
Skenario dasar	539.140	-
Skenario 1	535.244	-0,73
Skenario 2	551.631	2,16
Skenario 3	537.207	0,36
Skenario 4	537.837	0,21
Skenario 5	549.700	1,97
Skenario 6	550.511	2,05
Skenario 7	519.514	-4,78

Keterangan:

- Skenario 1 : Produk Domestik Regional Bruto naik 11%
- Skenario 2 : Jumlah Penduduk naik 3%
- Skenario 3 : Investasi naik 7%
- Skenario 4 : Pengeluaran Pembangunan naik 18%
- Skenario 5 : Jumlah Penduduk naik 3% dan Investasi naik 7%
- Skenario 6 : Jumlah Penduduk naik 3% dan Peng. Pembangunan naik 18%
- Skenario 7 : Produk Domestik Regional Bruto naik 11%, Investasi naik 7%, Pengeluaran Pembangunan naik 18% dan Jumlah Penduduk turun 3%

Berdasarkan Tabel 2 dapat dilihat hasil simulasi untuk skenario 1, yaitu peningkatan Produk Domestik Regional Bruto 11% berdampak terhadap penurunan jumlah penduduk miskin sebesar 0,73%. Hasil yang berbeda pada skenario 2, yaitu peningkatan jumlah penduduk sebesar 3% akan meningkatkan jumlah penduduk miskin sebesar 2,26%. Skenario 3 menunjukkan bahwa peningkatan investasi 7% akan menurunkan jumlah penduduk miskin sebesar 0.36%. Selanjutnya pada skenario 4, yaitu pengeluaran pembangunan meningkat sebesar 18% akan menurunkan jumlah penduduk miskin sebesar 0,24.

Hasil simulasi yang berbeda dilihat pada skenario 5 yang bertanda positif yang mengindikasikan bahwa peningkatan jumlah penduduk 3% dan investasi 7% juga akan meningkatkan jumlah penduduk miskin sebesar 1,92%. Pada skenario 6 dapat dilihat bahwa peningkatan jumlah penduduk 3% dan peningkatan pengeluaran pembangunan 18%, akan meningkatkan jumlah penduduk miskin sebesar 2,03%. Skenario 7 menunjukkan bahwa apabila peningkatan Produk Domestik Regional Bruto 11%, peningkatan investasi 7% dan pengeluaran pemerintah 18% diikuti dengan penurunan jumlah penduduk sebesar 3% akan menurunkan jumlah penduduk miskin sebesar 3,78%.

Berdasarkan hasil simulasi kebijakan yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa peningkatan Produk Domestik Regional Bruto, investasi dan pengeluaran pembangunan yang disertai dengan penurunan jumlah penduduk memiliki kontribusi menurunkan jumlah penduduk miskin tertinggi, yaitu sebesar 3,78%. Hasil simulasi kebijakan ini memberikan gambaran bahwa investasi dan pengeluaran pembangunan menjadi faktor penting untuk mengurangi jumlah penduduk miskin apabila diikuti dengan penurunan jumlah penduduk.

PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor dominan yang mempengaruhi kemiskinan di Provinsi Riau yaitu rata-rata lama sekolah, usia harapan hidup dan pengangguran. Berdasarkan nilai elastisitas tersebut diketahui kemiskinan di Provinsi Riau responsif pada jangka pendek terhadap variabel rata-rata lama sekolah dan usia harapan hidup.

Kebijakan peningkatan pertumbuhan ekonomi, investasi, pengeluaran pembangunan dan penurunan jumlah penduduk berdampak positif terhadap penurunan jumlah penduduk miskin di Provinsi Riau. Artinya, kombinasi kebijakan-kebijakan tersebut mampu mengurangi jumlah penduduk miskin di Provinsi Riau.

Penelitian ini merekomendasikan untuk mengentaskan kemiskinan melalui (1) Peningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan merata di setiap golongan pendapatan melalui penciptaan iklim investasi dan berusaha yang kondusif serta investasi yang bersifat padat karya harus ditingkatkan, (2) Pengendalian jumlah penduduk melalui program keluarga berencana perlu dipertahankan, (3) Peningkatkan IPM pendidikan melalui peningkatan rata-rata lama sekolah dan angka harapan hidup. program wajib belajar 12 tahun yang konsisten dengan memberikan beasiswa kepada anak-anak miskin, (4) Peningkatkan kesehatan melalui pelayanan kesehatan gratis, peningkatan kualitas gizi bayi dan ibu, (5) Peningkatkan program-program pembangunan bersifat padat karya dan memberikan penyuluhan serta pembinaan sehingga dapat meningkatkan kualitas dan produktivitas tenaga kerja, dan (6) Peningkatkan pengeluaran pembangunan melalui anggaran yang dikeluarkan dalam penanggulangan kemiskinan diwujudkan melalui berbagai program yang berfokus pada peningkatan tingkat pendidikan, kesehatan, pelayanan perumahan, subsidi, dll.

DAFTAR PUSTAKA

- Arsyad, Lincoln. 2010. *Ekonomi Pembangunan*. STIM YKPN. Yogyakarta.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Riau. 2013. *Statistik Kesejahteraan Provinsi Riau*. Badan Pusat Statistik Riau. Pekanbaru.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Riau. 2014. *Riau Dalam Angka*. Badan Pusat Statistik Riau. Pekanbaru.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Riau. 2015. *Riau Dalam Angka*. Badan Pusat Statistik Riau. Pekanbaru.
- Brata, Aloysius Gunadi. 2005. *Investasi Sektor Publik Lokal, Pembangunan Manusia Dan Kemiskinan*. Lembaga Penelitian - Universitas Atma Jaya, Yogyakarta.
- Bappenas. 2010. Bab 16 Penanggulangan Kemiskinan. <http://www.bappenas.go.id/files/5413/6082/9497/bab-16-penanggulangan-kemiskinan.pdf>. Diakses 24 Januari 2015 Pukul 09.18 WIB.
- Budiono. 1999. *Teori Pertumbuhan Ekonomi*. BPFE. Yogyakarta
- Intriligator, M. D. 1978. *Econometric Model, Techniques, and Applications*. Prentice Hall Inc. New Jersey.
- Jhingan ML. 2008. *Ekonomi Perencanaan dan Pembangunan*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Koutsoyiannis, A. 1977. *Theory of Econometrics*. Harper and Row Publisher Inc. New York.
- Todaro, MP. 2000. *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga*. Edisi Ketujuh. Erlangga. Jakarta.
- Permana, Anggit Yoga. 2012. Analisis Pengaruh PDRB, Pengangguran, Pendidikan, dan Kesehatan terhadap Kemiskinan di Jawa Tengah Tahun 2004-2009. *Jurnal IESP Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Diponegoro* 1(1):1.
- Prastyo, Adit Agus. 2010. Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Tingkat Kemiskinan (Studi Kasus 35 Kabupaten/Kota di Jawa Tengah Tahun 2003-2007). Skripsi Fakultas Ekonomi, Universitas Diponegoro, Semarang.
- Pyndy R. S and D. L Rubenfield. 1991. *Econometric Models and Economic Forcasts*. Third Edition McGraw-Hill Inc. New York.
- Siregar, H dan Dwi Wahyuniarti. 2008. Dampak Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Penurunan Jumlah Penduduk Miskin. http://pse.litbang.deptan.go.id/ind/pdf/PROS_2008_MAK3.pdf. Diakses 15 Mei 2013 Pukul. 20.25 WIB.
- Sukirno, Sadono. 2005. *Makroekonomi: Teori Pengantar*. PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Sukirno, Sadono. 2006. *Ekonomi Pembangunan: Proses, Masalah dan Dasar Kebijakan*. Kencana. Jakarta
- Sumarsono, Sonny. 2003. *Ekonomi Manajemen Sumber Daya Manusia dan Ketenagakerjaan*. Graha Ilmu. Yogyakarta.
- Todaro, Michael P. 2000. *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga*. Edisi Ketujuh. Erlangga. Jakarta.
- Todaro, Michael dan Smith. 2006. *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga*. Edisi Kesembilan. Erlangga. Jakarta.
- Verbeek, M. 2000. *A Guide to Modern Econometrics*. John Wiley & Sons Ltd. Chichester.
- Widarjono, A. 2009. *Ekonometrika Pengantar dan Aplikasi untuk Ekonomi dan Bisnis*. Ekonisia. Jakarta.
- Wongdesmiati. 2009. *Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan di Indonesia: Analisis Ekonometrika*. <http://wongdesmiwati.files.wordpress.com/2009/10/pertumbuhan-ekonomi-dan-pengentasan-kemiskinan-di-indonesia-analisis-ekonometrika.pdf>. Diakses pada tanggal 10 Mei 2013.

ORIGINALITY REPORT

23%

SIMILARITY INDEX

25%

INTERNET SOURCES

10%

PUBLICATIONS

19%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

eprints.binadarma.ac.id

Internet Source

1%

2

repository.ipb.ac.id

Internet Source

1%

3

Submitted to Universitas Andalas

Student Paper

1%

4

repository.iainpurwokerto.ac.id

Internet Source

1%

5

repository.unhas.ac.id

Internet Source

1%

6

www.damandiri.or.id

Internet Source

1%

7

pustaka.unpad.ac.id

Internet Source

1%

8

eprints.walisongo.ac.id

Internet Source

1%

9

Submitted to Universitas Airlangga

Student Paper

1%

10	ejournal.uin-suka.ac.id Internet Source	1%
11	es.scribd.com Internet Source	1%
12	indeksprestasi.blogspot.com Internet Source	1%
13	repository.usu.ac.id Internet Source	1%
14	Submitted to iGroup Student Paper	1%
15	text-id.123dok.com Internet Source	1%
16	Submitted to Universitas Negeri Surabaya The State University of Surabaya Student Paper	1%
17	repositori.uin-alauddin.ac.id Internet Source	1%
18	windiadmin.blogspot.com Internet Source	1%
19	jimfeb.ub.ac.id Internet Source	1%
20	ejournal.unesa.ac.id Internet Source	1%

www.slideshare.net

21	Internet Source	1%
22	eprints.ums.ac.id Internet Source	1%
23	qdoc.tips Internet Source	1%
24	123dok.com Internet Source	1%
25	repository.unair.ac.id Internet Source	1%
26	triagungkurnianto.wordpress.com Internet Source	1%
27	Submitted to Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Gadjah Mada Student Paper	1%
28	Submitted to Universitas Sebelas Maret Student Paper	1%

Exclude quotes On
Exclude bibliography On

Exclude matches < 1%